

# TRAFFIC DIVISION PERFORMANCE OF BARRU DISTRICT COMMUNICATION SERVICE

**Marsuki**

STIA Al Gazali Barru  
marsuki@algazali.ac.id

## ABSTRACT

*Barru district city's communication service is an organization with vision and mission to serve the general public responsible for the traffic system in Barru, so that it is required to prepare itself and conducts improvement continuously in the attempt of anticipating the increasingly complex traffic problems. For that reason, in order to give service consistent with the public's desire and need, there should be performance evaluation and development so that the organization performance can be optimal. The objectives of research are (1) to find out how Traffic Division Performance of Barru City's Communication Service is and (2) to find out the inhibiting and factors the ways of coping with the obstacles to improve the traffic division performance of Barru City's Communication Service. The study belongs to a descriptive qualitative research. The research was taken place in of Barru City's Communication Service office. The data source employed was informen and document. Techniques of collecting data used was interview and library study. The sampling technique used was purposive sampling. The data validity technique used was data triangulation. Technique of analyzing data employed was interactive analysis. The result of research shows that the performance of Traffic Division. Performance of Barru City's Communication Service has been fairly good in 2020, despite some failures in their work program implementation. The performance of Barru City's Communication Service can be seen from the organizational effectiveness, that is, the achievement of traffic smoothness and decreased number of traffic breach. In addition, the service's performance can also be seen from the responsability accountability, that is, the responsibility budget employed*

*based on the fund allocation given by the Barru city's government to the Communication Service for the implementation of activity programs particularly for the procurement and maintenance of traffic infrastructure as well as organizational operational expense entirely.*

*Keywords: transportation, organization, traffic, performance*

## **KINERJA BIDANG LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARRU**

### **ABSTRAK**

*Dinas Perhubungan Kabupaten Barru adalah suatu organisasi yang memiliki visi dan misi yaitu pelayanan kepada masyarakat umum. Dinas Perhubungan merupakan organisasi publik yang bertanggung jawab atas sistem lalu lintas di Barru sehingga dituntut untuk mempersiapkan diri dan secara terus menerus melakukan perbaikan dalam rangka mengantisipasi berbagai masalah lalu lintas yang semakin kompleks. Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat diperlukan pengkajian dan pengembangan kinerja sehingga kinerja organisasi dapat optimal. Tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas Kota Surakarta. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan cara mengatasi hambatan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas Kota Surakarta. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sumber data yang digunakan adalah informan dan dokumen atau arsip. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi data. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas Kabupaten Barru selama tahun 2020 sudah cukup baik. Meskipun dalam pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan tidak selalu berhasil. Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barru dapat diketahui berdasarkan efektivitas organisasi, yaitu tercapainya kelancaran lalu lintas dan menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas. Selain itu, kinerja dinas juga dapat diketahui dari akuntabilitas organisasi, yaitu pertanggungjawaban anggaran yang digunakan berdasarkan alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Barru kepada Dinas Perhubungan untuk pelaksanaan program kegiatan terutama untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas serta biaya operasional organisasi secara keseluruhan.*

*Kata kunci: perhubungan, organisasi, lalu lintas, kinerja*

## A. PENDAHULUAN

Tata pemerintahan yang baik merupakan hal penting pada sektor organisasi publik. Tata pemerintahan yang baik pada sektor publik belum tentu menjamin kinerja pemerintah juga akan baik pada suatu negara. Hal tersebut tergantung kepada kebijakan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan suatu negara.

Saat ini, kinerja organisasi terutama organisasi publik mendapat sorotan dari masyarakat dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan masyarakat mulai kritis dalam menilai atas pelayanan yang diberikan terutama oleh organisasi publik. Masyarakat mulai menuntut kepada setiap organisasi publik dalam memberikan pelayanan umum, baik berupa barang atau jasa, agar lebih profesional dan berkualitas kepada setiap anggota masyarakat. Pelayanan yang lebih profesional dan berkualitas merupakan wujud dari *good governance* (tata pemerintahan yang baik), terutama dalam pelayanan publik.

Bagus atau tidaknya suatu kinerja dari organisasi publik dapat diketahui dengan melakukan suatu pengukuran. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi kinerja dari suatu organisasi tersebut, misalnya lingkungan organisasi, budaya yang

ada dalam organisasi, sarana dan prasarana, penilaian kinerja dan umpan balik. Pengukuran atau kinerja pada suatu organisasi yang memiliki *output* dalam bentuk barang, dapat dilihat dari kuantitasnya yaitu jumlah barang yang dihasilkan atau seberapa lama barang tersebut dapat dihasilkan. Sementara kinerja pada suatu organisasi yang bergerak di bidang jasa dapat dilihat dari kepuasan pelanggan atau kualitas pelayanan yang diberikan suatu organisasi terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut.

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (A.P Mangkunegara, 2001 : 67). Selain itu, kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu hasil dan usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu.

Adapun untuk definisi kinerja organisasi mempunyai banyak pengertian. Menurut Wibowo dan Atmosudirjo (dalam Harbani Pasolong, 2007 : 176) mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah:

”sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan

melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif”.

Selanjutnya definisi kinerja organisasi menurut Chaizi Nasucha (2004 : 107) adalah :

”efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui suatu usaha sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus mencapai kebutuhannya secara efektif.

Dinas perhubungan adalah sebuah unit kerja di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Barru yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas angkutan jalan. Transportasi memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam ikut mendorong dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan daerah terutama keterkaitan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat (*publik service*), penunjang kegiatan ekonomi daerah, dan salah satu potensi pendapatan daerah. Salah satu bidang transportasi yang memerlukan perhatian lebih yakni transportasi darat karena sebagian

besar aktivitas manusia berada di darat.

Penanganan masalah kelancaran arus lalu lintas merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Dalam hal ini adalah menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, khususnya bidang lalu lintas yang memiliki tugas mengatur lalu lintas agar arus lalu lintas dapat berjalan dengan lancar.

Dinas Perhubungan Kabupaten Barru adalah suatu organisasi yang memiliki visi dan misi yaitu pelayanan kepada masyarakat umum. Dinas Perhubungan merupakan organisasi publik yang bertanggung jawab atas

sistem lalu lintas di Surakarta sehingga dituntut untuk mempersiapkan diri dan secara terus menerus melakukan perbaikan dalam rangka mengantisipasi berbagai masalah lalu lintas yang semakin kompleks.

Namun demikian, untuk menilai suatu kinerja dari organisasi publik tidak cukup hanya melihat dari segi hasilnya. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kinerja organisasi publik yang memiliki volume kegiatan tinggi seperti halnya Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas Kabupaten Barru. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan bagaimana cara mengatasi hambatan

untuk meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas Kabupaten Barru seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan lingkungan guna mencapai hasil yang maksimal.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, karena mutu, nilai validitas dari penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya.

Metode penelitian menurut Sugiyono pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2005: 1). Berdasarkan pengertian tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Jadi, suatu metode dipilih dengan pertimbangan keserasian obyek, tujuan, sasaran, dan variabel masalah yang hendak diteliti.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penilaian kerja merupakan penilaian terhadap keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Dalam hal ini akan disajikan mengenai hasil penelitian tentang kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yang berfokus pada kriteria akuntabilitas, yang juga akan dijelaskan pula mengenai faktor pendukung dan faktor penghambatnya sehingga akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat diperlukan pengkajian dan pengembangan kinerja sehingga kinerja organisasi dapat optimal.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban, yang dilaksanakan secara periodik. Dalam organisasi publik, akuntabilitas suatu institusi pemerintah adalah merupakan suatu perwujudan kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan visi, misi, strategi, maupun operasionalisasi/

pelaksanaannya dalam institusi yang bersangkutan. Pertanggungjawaban ini umumnya adalah dilakukan terhadap *stakeholders* atau pejabat publik yang dipilih masyarakat (*elected officials*). Akuntabilitas berkenaan dengan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian misi organisasi. akuntabilitas mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang atau amanah tersebut terhadap faktor eksternal organisasi yaitu *stakeholders* atau *elected officials*.

### **1. Kinerja Dinas Perhubungan Kota Surakarta**

Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barru selama tahun 2020 dapat dikatakan cukup bagus. Meskipun dalam pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan tidak selalu berhasil. Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barru dapat diketahui berdasarkan:

a. Efektivitas organisasi. Hal ini dapat diketahui dari tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Adapun tujuan tersebut adalah tercapainya kelancaran lalu lintas dan menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas. Kelancaran lalu lintas merupakan tujuan utama dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta karena dengan kelancaran arus lalu lintas akan memudahkan

mobilitas penduduk dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kabupaten Barru merupakan kota yang mengalami perkembangan sangat pesat sehingga terdapat beberapa kawasan yang memiliki tingkat kepadatan pada jam-jam tertentu. Oleh karena itu, untuk memperlancar arus lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Barru melakukan beberapa tindakan, yaitu (1) pemasangan lampu lalu lintas, terutama pada titik-titik persimpangan jalan; (2) larangan parkir pada tempat-tempat tertentu, misalnya pada ruas-ruas jalan utama yang dapat mengakibatkan kemacetan dan (3) analisis dampak lingkungan (andalalin) perlu dilakukan mengingat perkembangan pembangunan atau pengembangan kawasan di Kabupaten Barru sehingga harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan, salah satunya adalah mengenai analisis dampak lalu lintas. Adapun tujuan lainnya adalah menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas. Usaha yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Barru untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas adalah dengan dilakukannya pemasangan rambu-rambu lalu lintas, yaitu memasang rambu

lalu lintas dan memasang tanda rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas juga dikarenakan saat ini masyarakat mulai meningkatkan kesadarannya dalam berlalu lintas. Hal ini karena pihak Dinas Perhubungan secara rutin ada program sosialisasi tertib lalu lintas, yaitu tentang penggunaan sabuk keselamatan dan helm standar.

b. Akuntabilitas organisasi

Laporan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang berisi gambaran pelaksanaan kinerja pemerintah yang berfokus masyarakat selama periode yang telah ditentukan serta nantinya dapat dipertanggungjawabkan oleh seorang Kepala Daerah/ Pimpinan Instansi sebagai hasil pelaksanaan kinerja organisasinya. Akuntabilitas keuangan menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis mengenai capaian indikator kinerja instansi. Anggaran yang digunakan adalah berdasarkan alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Barru kepada Dinas Perhubungan untuk pelaksanaan program kegiatan terutama untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas serta

biaya operasional organisasi secara keseluruhan.

Dengan demikian, dapat dikatakan secara umum sudah banyak peningkatan dalam pelayanan masyarakat akan tetapi masih diperlukan kerja keras lagi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.

## 2. Faktor penghambat dan cara mengatasi hambatan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas Kota Surakarta

Kinerja dari Dinas Perhubungan Kabupaten Barru dapat dikatakan sudah cukup baik. Namun demikian, tetap ada faktor yang menjadi penghambat dalam peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barru. Hambatan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Sumber daya manusia/personil yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barru dari segi kualitas belum memadai khususnya segi profesionalisme berkualifikasi Diklat, misalnya diklat penyidik PNS. Selain itu, khusus PNS berkualifikasi penguji yang memiliki jenjang strata penyelia sangat terbatas sehingga perlu adanya peningkatan jenjang pendidikan teknis dari strata pelaksana ditingkatkan ke strata

pelaksana lanjutan selanjutnya dari jenjang strata pelaksana lanjutan ditingkatkan ke strata penyelia.

- b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Meskipun secara kuantitas ada penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas, tetapi secara kualitas masyarakat masih belum memiliki kesadaran dalam berlalu lintas. Misalnya, masyarakat masih sering parkir di badan jalan, padahal sebenarnya tempat tersebut tidak boleh untuk tempat parkir.
- c. Rambu yang dipasang sering hilang. Banyaknya rambu-rambu lalu lintas yang hilang karena diambil atau memang sengaja dicopot oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini mungkin terjadi karena kurangnya pengawasan dari pihak Dinas Perhubungan terhadap sarana dan prasarana yang ada.
- d. Keterbatasan anggaran. Alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Barru kepada Dinas Perhubungan masih terbatas sehingga untuk melakukan pengembangan program atau kegiatan maupun melengkapi sarana dan prasarana yang belum ada dapat dilakukan secara maksimal.

Adapun untuk mengatasi hambatan tersebut Dinas Perhubungan Kota Surakarta melakukan beberapa hal antara lain :

- a. Memberdayakan SDM dan mengoptimalkan fasilitas yang ada dengan terus berupaya meningkatkan kondisi SDM secara bertahap.

Untuk meningkatkan kinerja, Dinas Perhubungan Kabupaten Barru telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut: (1) mengusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah untuk mengirimkan personil sesuai dengan kebutuhan ke diklat-diklat teknis, (2) menugaskan karyawan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia baik melalui pendidikan ataupun seminar; (3) mengadakan kerjasama dengan Dinas Perhubungan Tingkat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Instansi terkait untuk mengadakan Bimbingan Teknis dasar-dasar kelalulintasan. Selain itu, juga dilakukan pelatihan-pelatihan atau diklat-diklat bagi seluruh pegawai Dinas Perhubungan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan operasi dan penertiban terhadap

Kendaraan Bermotor Wajib Uji maupun pelanggaran lalu lintas lainnya. Kerjasama ini dilakukan dengan instansi lain, yaitu dengan Polres Barru, SATLANTAS, UPPD Propinsi SUL - SEL Wilayah Parepare, Jasa Raharja dan Pengadilan Negeri Barru.

- c. Optimalisasi pelayanan penertiban dan pengendalian lalu lintas.

Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Barru adalah untuk mengatur ketertiban lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan yang biasa terjadi pada jam-jam sibuk. Selain itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Barru juga melakukan pengendalian lalu lintas, yaitu dengan pemasangan lampu lalu lintas, larangan parkir maupun pengendalian lokasi parkir.

- d. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada saat ini.

Optimalisasi terhadap sarana dan prasarana lalu lintas dikarenakan keterbatasan anggaran untuk pembelian sarana dan prasarana lalu lintas sehingga terhadap peralatan yang sudah ada saat ini digunakan semaksimal mungkin dan dilakukan pemeliharaan terhadap alat-alat yang sudah ada.

## D. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan pada artikel ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barru selama tahun 2020 dapat dikatakan cukup bagus. Meskipun dalam pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan tidak selalu berhasil
- Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barru dapat diketahui berdasarkan efektivitas organisasi, yaitu tercapainya kelancaran lalu lintas dan menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas. Selain itu, kinerja dinas juga dapat diketahui dari akuntabilitas organisasi, yaitu pertanggungjawaban anggaran yang digunakan berdasarkan alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Barru kepada Dinas Perhubungan untuk pelaksanaan program kegiatan terutama untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas serta biaya operasional organisasi secara keseluruhan.
- Bagus atau tidaknya suatu kinerja dari organisasi publik dapat diketahui dengan melakukan suatu pengukuran. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi

kinerja dari suatu organisasi tersebut, misalnya lingkungan organisasi, budaya yang ada dalam organisasi, sarana dan prasarana, penilaian kinerja dan umpan balik. Pengukuran atau kinerja pada suatu organisasi yang memiliki output dalam bentuk barang, dapat dilihat dari kuantitasnya yaitu jumlah barang yang dihasilkan atau seberapa lama barang tersebut dapat dihasilkan. Sementara kinerja pada suatu organisasi yang bergerak di bidang jasa dapat dilihat dari kepuasan pelanggan atau kualitas pelayanan yang diberikan suatu organisasi terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, 2006, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- A.P Mangkunegara, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Cetakan Ketiga), Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Burhan Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Chaizi Nasucha, 2004, *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek*, Jakarta, Grasindo.
- Dessler, Gary, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Prenhalindo: Jakarta.
- Harbani Pasolong, 2007, *Teori Administrasi Publik*, Bandung, Alfabeta.
- H.B. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Surakarta, UNS Press.
- Lembaga Administrasi Negara, 1999, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 589/IX/6/Y/99, *Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 2007, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, UI Press.
- Ratminto&Atik Septi, 2006, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta, Putaka Pelajar.
- Ruffner, Michael dan Joaquin Sevilla, 2004, "Public Sector Modernisation: Modernising Accountability and Control", *OECD Journal on Budgeting - Volume 4 - No.2 - ISSN 1608-7143*, www.google.com.
- Sri Budi Cantika Yuli, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Malang, UMM Press.

- Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Suyadi Prawirosentono, 1999, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan*. 1999. Yogyakarta : BPFE.
- Tunde, Agara dan Olarinmoye Omobolaji, 2009, "Ethics and Accountability in Nigeria's Public Service: An Historical Overview", *Journal of Public Administration and Policy Research*, Vol.1 (1) pp. 011-018 May.
- Wahyudi Kumorotomo, 1996, "Meningkatkan Kinerja BUMN: Antisipasi Terhadap Kompetisi dan Kebijakan